

ABSTRAK

Penegakkan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum pidana. Dalam perkara penegakkan hukum pidana di Indonesia, ada dua landasan hukum yang dipakai, yaitu landasan hukum formil dan landasan hukum materiil. Landasan hukum formil adalah hukum yang dijadikan landasan tentang tata cara melakukan penegakkan hukum pidananya, atau tata aturan yang harus dipakai dalam proses penegakkan hukum pidana materiilnya (KUHP dan peraturan hukum pidana lainnya).

Berdasarkan latar belakang, maka muncul permasalahan yakni Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal dan Apakah terdapat kendala-kendala dalam implementasi dan bagaimana cara mengatasinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan data primer dan data sekunder, data dianalisa secara kualitatif, permasalahan dianalisa dengan teori kepastian hukum dan teori hukum progresif.

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah proses pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan bagian dari kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan barang buktinya. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal kurang bisa mendukung kelancaran proses penyidikan terhadap kasus yang ditangani. Bahkan disinyalir dapat memberi keleluasaan kepada pelaku untuk melarikan diri, mempengaruhi para saksi dan keleluasaan untuk menghilangkan barang bukti. tahapan yang sudah dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Kendal dalam mengatasi kendala adalah dengan cara sebagai berikut untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pelakunya belum jelas maka untuk pengisian nama tersangka dalam SPDP dikosongkan, sehingga SPDP hanya dikirim kepada kejaksaan dan pelapor. Apabila telah ditemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka, maka dilakukan pengiriman SPDP yang kedua dengan mencantumkan nama pelaku sebagai tersangka. Pengirimannya ditujukan kepada kejaksaan, pelapor, dan terlapor. Apabila terlapor melarikan diri, SPDP tetap diberikan kepada keluarga terlapor dan penyidik tetap melakukan upaya penangkapan kepada pelaku. Apabila upaya penangkapan belum berhasil, maka penyidik menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kata Kunci : Implementasi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pencurian dengan Pemberatan

ABSTRACT

Law enforcement is one effort to create order, security, and peace in society, either as effort of prevention and eradication or action after the violation of criminal law. In cases of criminal law enforcement in Indonesia, there are two legal grounds used, namely the basis of formal law and the foundation of material law. The formal legal basis is the law that is used as the basis for the procedure of enforcing the criminal law, or the rules of procedure which must be used in the process of enforcing its material criminal law (KUHP and other criminal law).

Based on the background, then the problem arises. What is the process of investigating the criminal act of theft with a reservation at Sat Reskrim Kendal Police before the issuance of the decision of the Constitutional Court Number 130 / PUU-XIII / 2015, How Implementation of Decision of the Constitutional Court Number 130 / PUU-XIII / 2015 on the process the investigation of criminal theft with the sanction in Sat Reskrim Polres Kendal and Is there any obstacles in implementation and how to overcome the Decision of Constitutional Court Number 130 / PUU-XIII / 2015 to the process of investigation of crime of theft with a weight at Sat Reskrim Polres Kendal.

The approach used in research is sociological juridical. Specification of research in this research is analytical descriptive. Data used primary data and secondary data, data analyzed qualitatively, problem analyzed with legal certainty theory and progressive law theory.

Based on the results of this study is the process of examination of the suspect perpetrators of criminal acts is part of the investigation activities that aims to obtain information, clarity and identity suspects and evidence. Implementation of Constitutional Court Decision Number 130 / PUU-XIII / 2015 on the process of investigation of criminal theft with a graft in Sat Reskrim Polres Kendal less able to support the smooth process of investigation of cases handled. Even it is suppose to give freedom to the perpetrators to escape, influence the witnesses and the discretion to eliminate the evidence. the stage that has been done by Sat Reskrim Kendal Police in overcoming the obstacle is in the following way for criminal act of theft with the culprit that the perpetrator not yet clear then to fill the name of suspect in SPDP emptied, so SPDP only sent to prosecutor and reporter. If a sufficient evidence has been found to establish the perpetrator as a suspect, then a second SPDP shall be sent with the name of the perpetrator as a suspect. The delivery is addressed to the prosecutor, the complainant, and the reported party. In the case of reported escaping, the SPDP is still given to the reported family and the investigator keeps making the arrest attempt to the perpetrator. If the arrest attempt has not succeeded, the investigator issues a List of People Search (DPO).

Keywords: Implementation, Constitutional Court Decision, Theft with Objection